

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Santunan Kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah dilaksanakan, namun dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa kendala yang ditemukan pada indikator-indikator teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum sepenuhnya merata, pemahaman prosedur masih rendah, dan informasi yang diterima masyarakat belum sepenuhnya konsisten.

- a. Dimensi transformasi informasi: Seluruh masyarakat mengetahui adanya program santunan kematian, namun sumber informasi didominasi jalur informal seperti tetangga atau kerabat (38,46%), sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan informasi.
- b. Dimensi kejelasan informasi: Sebagian besar informan (53,85%) menyatakan prosedur sulit dipahami, sementara yang menyatakan sangat mudah hanya 34,62%, dan cukup mudah 11,54%. Pengetahuan dokumen relatif lebih baik (69,23% mengetahui), namun masih ada 30,77% yang belum paham.

- c. Dimensi konsistensi informasi: Setengah responden (50%) menilai informasi konsisten, sedangkan 46,15% menilai tidak konsisten, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan perbedaan pemahaman.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, indikator sumber daya menunjukkan bahwa program telah didukung fasilitas memadai, namun masih terkendala pada SDM, anggaran, dan kecukupan informasi.

- a. Dimensi sumber daya manusia: pihak paling banyak membantu masyarakat adalah perangkat desa (46,15%), kemudian orang lain (42,31%) dan kesra kecamatan (11,54%). Sebagian besar (61,54%) menilai petugas sudah memadai, namun 30,77% menilai belum memadai.
- b. Dimensi fasilitas: Seluruh informan (100%) memiliki sarana pendukung, dan fasilitas pelayanan tergolong lengkap.
- c. Dimensi Anggaran: tidak tersedia alokasi khusus untuk sosialisasi dan pelatihan teknis di tingkat kecamatan maupun desa.
- d. Dimensi informasi dan kewenangan: sebagian besar (69,23%) menilai informasi belum cukup, meski seluruh informan (100%) yakin petugas memiliki kewenangan yang jelas.

3. Disposisi

Disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi petugas dalam memberikan pelayanan santunan kematian. Namun, petuga belum secara proaktif memastikan masyarakat mendapatkan informasi secara jelas dan merata.

- a. Dimensi kejujuran: seluruh informan (100%) menyatakan petugas jujur dan transparan.
- b. Dimensi Komitmen: seluruh informan (100%) menilai petugas komitmen dan bertanggung jawab.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi telah terbentuk dengan koordinasi antara kecamatan dan desa yang dinilai cukup baik, namun mekanisme teknis dan sosialisasi belum maksimal.

- c. Dimensi mekanisme/SOP: Hanya 38,46% yang merasa prosedur jelas dan mudah diikuti, 38,46% menilai sulit, dan 23,08% tidak tahu. Terkait ketersediaan petunjuk penggunaan aplikasi, hanya 38,46% yang mengetahui, 34,62% menyebut tidak ada, dan 26,92% tidak tahu.
- d. Dimensi struktur birokrasi: koordinasi antar kecamatan dan desa dinilai cukup baik, terutama dalam penyelesaian administrasi.

Secara keseluruhan, tantangan utama meliputi penyebaran informasi yang belum terstruktur, keterbatasan anggaran dan pelatihan, serta pemahaman prosedur yang belum merata. Diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan SOP agar layanan berjalan lebih efektif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan mengenai Implementasi Aplikasi Sanduk dalam Pelayanan santunan Kematian di Kecamatan Kedungadem sebagai berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi dan pelatihan teknis.

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi secara rutin dan terstruktur, baik melalui pertemuan tatap muka, media sosial resmi, maupun papan informasi sehingga informasi yang diterima masyarakat lebih jelas dan konsisten.

2. Penguatan Kapasitas SDM

Melakukan pelatihan teknis secara berkala bagi perangkat desa dan kecamatan agar pendampingan kepada masyarakat lebih efektif.

3. Pengalokasian Anggaran Khusus

Menyediakan anggaran untuk mendukung pelatihan, sosialisasi, dan pengadaan sarana pendukung sehingga pelayanan dapat dilakukan secara optimal.

4. Penyempurnaan SOP dan Panduan Penggunaan

Menyusun dan menyebarkan panduan SOP yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

5. Peningkatan Koordinasi Lintas Tingkatan pemerintahan

Memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah khususnya dalam penanganan kendala teknis agar permasalahan dapat diselesaikan tanpa menghambat proses pelayanan.

6. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal untuk studi lebih lanjut terkait implementasi kebijakan dalam pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka-Press Uin Sunan Kalijaga.

Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung:Pustaka Setia.

Jumroh dan M.Yoga Jusri Pratama. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Insan Cendekia Mandiri.

Marwiyah, S. (2022). *Buku Kebijakan Publik 2022..Pdf*.

Sheyoputri, A. C. A. (2016). *Mengenal Dan Memahami Kemiskinan* (Issue 1).
[https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5938/Mengenal dan Memahami Kemiskinan _compres.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5938/Mengenal%20dan%20Memahami%20Kemiskinan_compres.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Solihin, D. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Yayasan Empat Sembilan Indonesia.
http://repository.unsada.ac.id/70/1/10Implementasi_Kebijakan_Kemiskinan.pdf

Yanti, V. A., Winarno, S. H., & Kurniasari, R. (2020). *Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Administrasi*. Universitas Bina Sarana Informatika.
<https://Grahailmu.Id/Product/Metode-Penelitian-Administrasi/>

Jurnal:

Clara, M., & Liauw, F. (2020). Redefinisi Kematian. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 1(2), 1725.
<https://doi.org/10.24912/Stupa.V1i2.4395>

Heriyanto, N., & Ulfah, S. M. (2022). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia

- Dalam Memberikan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 2723–2530. <https://E-Journal.Upr.Ac.Id/Index.Php/JAP/Article/View/5670%0Ahttps://E-Journal.Upr.Ac.Id/Index.Php/JAP/Article/Download/5670/3797>
- Maisyaroh. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 1–20. http://Jurmafis.Untan.Ac.Id/Index.Php/Publika/Article/View/887%0Ahttp://Jurmafis.Untan.Ac.Id/Index.Php/Publika/Article/Download/887/Pdf_132
- Nur Mustika, Siti Raudah, N. M. M. A. (2022). *Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Lampihong*. 45–50.
- Nurhalizah, S., Indartuti, E., & Hartono, S. (2023). Implementasi Pelayanan Publik Melalui Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. *PRAJA Observer: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Saputri, D., Swasanti, I., Novianto, H., & Lukito, C. (2024). Evaluasi Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)*, 8(3), 136–145.
- Vitriana, N., Agustiawan, & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis Of The Application Of The Local Government Information System (SIPD) At The Pekanbaru Regional

Financial And Asset Manage. *DIGIBIS : Digital Business Journal*, 1(1), 1–16.

[Http://Jurnal.Umt.Ac.Id/Index.Php/Digibis](http://Jurnal.Umt.Ac.Id/Index.Php/Digibis)

Wati, S. I., & Handayani, S. W. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Tentang Santunan Kematian Di Aceh Selatan. *Journal of Public Service*, 2(1), 75. <https://doi.org/10.35308/jps.v2i1.5178>

Skripsi/Tesis:

Akbar, W. (2023). *Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Digides (Digital Desa) Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru* [Universitas Hasanuddin]. [Http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26327/](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26327/)

Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Determinan kemiskinan. In *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* (Vol. 3).

Ayu, D., Sari, M., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Nusantara, U., & Kediri, P. (2022). *Analisis Motivasi Perangkat Desa Untuk Menciptakan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Ngadirenggo Wlingi, Blitar Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Sebagai Syarat Guna Gelar Sarjana Manajemen Pada Program Studi Manajemen*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Dewianti, S. (2021). *46 Bab Iii Metode Penelitian 3.1 Rancangan Penelitian* [STIE PGRI Dewantara Jombang]. [Http://Repository.Stiedewantara.Ac.Id/1903/5/15. BAB 3.Pdf](http://Repository.Stiedewantara.Ac.Id/1903/5/15.BAB%203.Pdf)

Efendi, I. (2022). *Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara*. Universitas Medan

Area.

Harmoko, R. (2015). *Bab II Tinjauan Pustaka*.

Ismail. (2022). *Penerapan E-Government Pelayanan Publik Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Putra, C., & Indrayana, C. (2022). Bencana alam (studi penelitian pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Karangasem). *Jurnal MODERAT*, 8(3), 595–604. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Rahmawati, A. Y. (2020). *Bab II Landasan Teoritis 2.1 Kebijakan Publik*. Uin Suska Riau.

Salman, R. (2019). Problematika Kemiskinan. In *Universitas Islam Riau* (Issue 7).

Sari, E. P. (2020). Ciri dan Faktor Kemiskinan dan Cara Penanggulangannya. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 1, 3. <http://eprints.umsida.ac.id/1406/1/REVISI MEDPEN FIX FIX banget.pdf>

Santy, N. D. (2021). Bab III Metode Penelitian A. Rancangan ... [Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta]. In *Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta*. [https://Digilib.Sttkd.Ac.Id/1807/4/Skripsi - Nengah Wahyu Diana Santy_4.Pdf](https://Digilib.Sttkd.Ac.Id/1807/4/Skripsi_-_Nengah_Wahyu_Diana_Santy_4.Pdf)

Sastrawati, R. (2020). *Bab Iii Metode Penelitian* [Universitas Muhammadiyah Gresik]. [Http://Eprints.Umg.Ac.Id/4036/4/2020_Ta_Mnj_16311066_Bab 3.Pdf](http://Eprints.Umg.Ac.Id/4036/4/2020_Ta_Mnj_16311066_Bab_3.Pdf)

Siboro, R. S. (2024). *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan E-KTP Di*

Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. Universitas Medan Area.

Tamba, F. (2022). *Kualitas Pelayanan Publik Pegawai Bagian Kesejahteraan Sosial Dalam Melayani Masyarakat Untuk Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Kantor Camat Tanjung Morawa.* Universitas Medan Area.

Peraturan/Undang-Undang:

Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (39).*
[https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/35033/PP Nomor 39 Tahun 2012.Pdf](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/35033/PP%20Nomor%2039%20Tahun%202012.Pdf)

Indonesia, P. P. (2009). *Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (25).* [https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/28077/UU Nomor 25 Tahun 2009.Pdf](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/28077/UU%20Nomor%2025%20Tahun%202009.Pdf)

Kab. Bojonegoro. (2021). *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbup 49 Tahun 2018 Tentang Santunan Kematian (47).* <https://jdih.bojonegorokab.go.id/Arsip/Info/273.html>